

The Mobile Child Forum: Community-Based Child Marriage Prevention Initiatives and Strategies

Forum Anak Bergerak: Inisiatif dan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis Komunitas

Eko Mukminto* , Mutmainah Nur Qoiri , Didik Purnomo , Rofi Wahanisa , Syahwal 

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia.

 : ekomukminto@mail.unnes.ac.id

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Child marriage remains a challenge in Pemalang Regency. Numerous studies have shown that child marriage has significant impacts on children's health, education, and future, particularly for girls.

Purposes of The Devotion: This article aims to develop a community-based strategy for preventing child marriage through the empowerment of the Children's Forum, grounded in a child rights and gender equality approach.

Method of The Devotion: This community service program is designed to enhance public understanding – especially among teenagers – of the negative consequences of child marriage and the importance of fulfilling children's rights through the Children's Forum community. The program involves training and interactive discussions, strengthening the capacity of the Children's Forum as agents of change, and fostering collaboration with local government, community leaders, and other stakeholders. This approach is expected to create a community that is more attentive to children's rights and gender equality, while also supporting Pemalang Regency's efforts to maintain and improve its Nindya status as a Child-Friendly Regency.

Results Main Findings of the Devotion: The outcomes of this community service initiative will be evaluated through success indicators such as the strengthened role of the Children's Forum in advocating for children's issues – particularly the prevention of child marriage – and, subsequently, increased public awareness and a reduction in child marriage cases.

Keywords: Child Marriages; SDGs; Children Forum.

Abstrak

Latar Belakang: Perkawinan anak merupakan problem yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Pemalang. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perkawinan anak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, maupun masa depan anak, terutama perempuan.

Tujuan Pengabdian: Artikel ini bertujuan untuk menginisiasi suatu strategi pencegahan perkawinan anak berbasis komunitas melalui pemberdayaan Forum Anak, dengan berbasis pada pendekatan hak anak dan kesetaraan gender.

Metode Pengabdian: Pengabdian masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pada remaja, mengenai dampak negatif perkawinan anak serta pentingnya pemenuhan hak anak melalui komunitas Forum Anak. Program ini melibatkan pelatihan dan diskusi interaktif, penguatan kapasitas Forum Anak sebagai agen perubahan, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan komunitas yang lebih peduli terhadap hak anak dan kesetaraan gender, sekaligus mendukung upaya Kabupaten Pemalang dalam mempertahankan dan meningkatkan status Nindya –Kabupaten Layak Anak.

Hasil/Temuan Pengabdian: Hasil pengabdian masyarakat ini akan dievaluasi melalui indikator keberhasilan seperti penguatan peran Forum Anak dalam advokasi isu-isu anak terutama dalam mencegah perkawinan anak dan selanjutnya meningkatkan kesadaran masyarakat, pengurangan kasus perkawinan anak.

Kata Kunci: Perkawinan Anak; SDGs; Forum Anak.

Submitted: 2025-11-05

Revised: 2026-07-15

Accepted: 2026-07-17

Published: 2026-08-19

How To Cite: Eko Mukminto, Mutmainah Nur Qoiri, Didik Purnomo, Rofi Wahanisa, and Syahwal. "The Mobile Child Forum: Community-Based Child Marriage Prevention Initiatives and Strategies." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 6 no. 2 (2026): 91-99. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v6i2.3503>

PENDAHULUAN

Alih-alih menyelesaikan masalah, perkawinan sebenarnya justru membawa masalah baru, apalagi perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur atau populer disebut Perkawinan anak. Di banyak tempat, perkawinan anak telah terbukti mempunyai dampak negatif bagi aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan terlebih bagi anak perempuan.¹ Hal ini dikarenakan, anak perempuan mempunyai semacam *label kultural* bahwa “*perempuan setinggi apapun tingkat pendidikannya, ia hanya berakhir sebagai istri*”.² Kemudian anak perempuan yang menikah dibawah umur seringkali tidak memiliki keterampilan atau pendidikan memadai untuk mendapatkan pekerjaan layak, yang mana akan meningkatkan risiko kemiskinan.³ Aspek pendidikan seringkali terbengkalai karena adanya paradigma bahwa menikah dan sekolah adalah dua pengalaman yang tidak mungkin berjalan beriringan. Begitu juga masalah kesehatan yang menghantui, dari problem kesehatan reproduksi hingga masalah pada bayi yang kurang gizi hingga *stunting* menjadi suatu masalah yang menghampiri para pasangan muda tersebut.⁴ Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia.⁵ Menanggapi hal tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai Program andalan “Jo Kawin Bocah” yang didengungkan akan menjadi solusi, namun ternyata angka perkawinan anak di beberapa kabupaten di Jawa Tengah terbilang masih relatif tinggi, Semisal di Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, atau Pemalang.⁶ Dan terkhusus di Pemalang, Perkawinan Anak terbilang problematik terlebih dengan statusnya sebagai predikat kategori Kota Layak Anak dengan kategori Nindya yang disandang kabupaten ini.

Perkawinan anak dapat dikatakan masih merupakan isu serius yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Pemalang, dengan dampak yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak, terutama anak perempuan. Khusus untuk Pemalang, ada kasus yang memprihatinkan, yakni pada bulan Juni 2024, *viral* di media sosial anak berusia 14 tahun dan masih berstatus pelajar SMP menikah (yang beberapa bulan sebelumnya dilaporkan telah mengundurkan diri dari sekolahnya).⁷ Meskipun kasus bocah 14 tahun yang menikah ini yang terjadi di Kabupaten Pemalang adalah kasuistis namun hal ini satu hal yang menjadi bahan refleksi bahwa perkawinan anak masih terjadi di sekitar kita. Fenomena perkawinan anak ini mengindikasikan bahwa, meskipun adanya perubahan hukum perkawinan di Indonesia yang membatasi usia perkawinan dan segala program intervensi pemerintah telah dilaksanakan, semua hal tersebut belum efektif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.⁸ Dan paradoksnya, bahkan dalam aspek hukum

¹ Mies Grijns et al., “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan,” *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan* 21, no. 1 (2016): 49–58.

² Cohen, A. C. (1971). Women and Higher Education; Recommendations for Change. *Phi Delta Kappan*. <https://www.jstor.org/stable/20373124>

³ Nike Dwi Putri, “Faktor Sosial Ekonomi Dalam Perkawinan Anak Di Sulawesi Selatan,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 11, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.47789>.

⁴ Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda*, 2015.

⁵ “5 Provinsi Dengan Tingkat Pernikahan Tertinggi 2024 - GoodStats Data,” n.d.

⁶ Nawal Nur Arafah and Purwanto Purwanto, “‘Jo Kawin Bocah’ Social Movement to Reduce Child Marriage Rates in Central Java,” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 7, no. 2 (2023): 127–42, <https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.2.17604>.

⁷ “Sepasang Murid SMP Menikah Dini Di Pemalang, Pihak Sekolah Kaget,” n.d.

⁸ Muhammad Nur Falah, Aufi Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah, “Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (October 2020): 167–82, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>.

terdapat adanya dispensasi pernikahan bagi anak yang diputuskan melalui putusan pengadilan yang sebenarnya kontradiksional dengan upaya pencegahan perkawinan anak.⁹

Penekanan pada pemahaman perkawinan yang masih terjebak pada kubangan keterdesakan ekonomi, kultur tradisi dan norma sosia yang menjadi penyebab perkawinan anak. Namun, faktor ekonomi dan sosial adalah yang paling dominan.¹⁰ Problem struktural ekonomi adalah problem signifikan yang berdampak pada jumlah perkawinan anak di suatu daerah.¹¹ Persepsi kultural yang menganggap bahwa menikah akan membawa berkah adalah salah satu dari sekian banyak motif yang memberikan dorongan mental *cum* spiritual bagi orang tua/keluarga untuk tak segan-segan merestui atau malah mempercepat pernikahan anak-anaknya.¹² Persepsi ini tidaklah seratus persen salah namun seringkali terbukti sebaliknya, khususnya bagi perkawinan anak yang terjadi untuk anak yang bahkan untuk sekolah dasar saja tidak tamat.

Beberapa program di negara-negara Asia Selatan menggunakan program "*Stay at schools*" untuk mengurangi perkawinan anak yang sekaligus menjaga hak anak atas pendidikan.¹³ Berkaca pada program-program tersebut, pendidikan adalah salah satu faktor yang memungkinkan untuk dipertahankan dan dapat memungkinkan mengurangi perkawinan anak. Namun untuk mempertahankan anak di sekolah *alias* memenuhi hak anak atas pendidikan ditengah pemahaman kultural dan keterdesakan ekonomi dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak.

Adapun konteks permasalahan-permasalahan perkawinan anak ini yang tidak dapat dikesampingkan seperti faktor keterdesakan ekonomi dan kultural yang menjadi faktor dominan, dan juga pemahaman kultural dan alasan pragmatis sebagai konsekuensi adanya kasus-kasus remaja/anak hamil diluar nikah. Meskipun demikian, berpijak pada hak atas pendidikan merupakan aspek yang fundamental bagi perkembangan anak maka dalam hal ini peran sekolah tidak dapat dikesampingkan. Upaya pencegahan perkawinan adalah suatu upaya yang dapat diwujudkan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan pendekatan berbasis komunitas. Forum Anak dalam konteks tersebut, dapat menjadi agen inspiratif yang memungkinkan anak menjadi motor penyalur aspirasi dan kebutuhannya. Forum Anak sendiri adalah suatu Forum yang berfungsi sebagai jembatan anak dan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan anak. Sehingga melalui Forum Anak dapat menjadi salah satu strategi berbasis komunitas untuk mengatasi masalah perkawinan anak. Sebagai agen penyalur aspirasi anak, Forum Anak perlu dibekali pemahaman dan kesadaran akan arti pentingnya hak anak atas pendidikan dan kesetaraan gender. Maka dengan demikian, pengabdian ini mempunyai tujuan harapannya untuk jangka panjang dapat meningkatkan pemahaman dan kedepannya juga pelibatan masyarakat dalam pengembangan diharapkan dapat mengurangi dan mencegah perkawinan anak dan meningkatkan kesadaran kesetaraan gender diantara para pelajar dan remaja.

⁹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, "Contradictions Between Marriage Dispensation and Efforts to Minimize Marriage In Indonesia," *Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (20AD): 203–22.

¹⁰ Diah Warastuti, Yulia Herawati, and Evi Kurniasih, "Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Indramayu," *Kesehatan Dan Kebidanan* 10, no. 2 (2021).

¹¹ Dian Latifiani, "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): 241–58, <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>.

¹² Mahendra Mahendra, Violis Maisuri, and Muflia Wijayati, "Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective," *MILRev : Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 282, <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6215>.

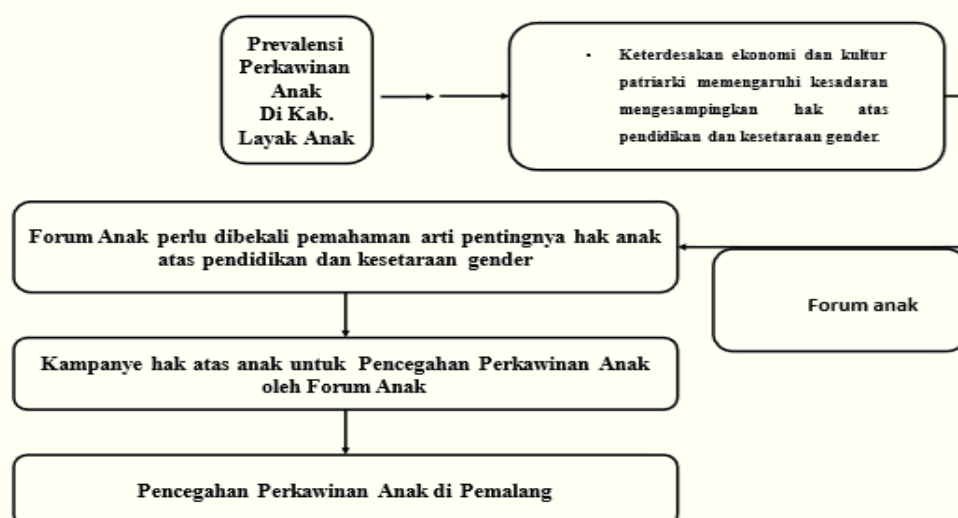
¹³ ICRW and UNFPA, "Child Marriage in Southern Asia," 2016, 1–23.

METODE PENGABDIAN

Metode untuk akan dilakukan guna membantu Forum Anak dalam memecahkan persoalan dan mencapai tujuan diuraikan secara sebagai berikut: 1) Pendekatan secara personal terhadap Forum Anak dengan secara periodik melakukan kunjungan atau melalui media telekomunikasi yang berkelanjutan setidaknya selama 1 kali dalam (satu) bulan. Dari kunjungan atau melalui media telekomunikasi periodik tersebut kami harap dapat melakukan observasi awal sehingga kami dapat mengerti dan memahami serta menemukan akar permasalahan dari urgensi peningkatan pengetahuan tentang situasi dan kondisi para siswa-siswi menyangkut literasi digital dan persepsi perilaku perempuan di media sosial. Hal ini digunakan sebagai observasi awal yang juga diharapkan dapat mendapatkan data atas pemahaman yang tidak terdapat di sekolah yang dianggap dapat menunjang kegiatan pengabdian masyarakat ini misalnya bagaimana kesadaran atas hak anak atas pendidikan maupun kesetaraan gender; 2) Perencanaan awal dengan Forum Anak Pemalang guna mengemukakan langkah-langkah kegiatan pengabdian masyarakat sehingga dapat melakukan koordinasi dengan baik mengenai waktu, tanggal, hari dan tempat pelaksanaan kegiatan; 3) Persiapan kegiatan Pengabdian dengan melakukan pengumpulan materi fisik dan non fisik yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian tersebut, tentu saja atas koordinasi dengan instansi mitra dalam hal ini Dinsoskabpp Kabupaten Pemalang dan Forum Anak Kabupaten Pemalang; 4) Sosialisasi dan diskusi interaktif terhadap para siswa-siswi anggota Forum Anak Pemalang bahwa pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan hasil kesepakatan dengan mitra bahwa akan dilaksanakan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Negeri Semarang dengan bekerja sama dengan instansi mitra setempat; 5) Pendampingan kepada para siswa-siswa dan para guru dan anggota sivitas akademik dalam hal peningkatan dan pemahaman literasi digital dan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari permasalahan yang dihadapi oleh mitra maka Tim Pengabdi telah melakukan pembekalan pengetahuan dan pemahaman tentang hak atas Pendidikan dan kesetaraan gender; kemudian adanya pendampingan para anggota Forum Anak dalam mengkampanyekan Pencegahan perkawinan Anak.



Gambar 1. Analisis situasi pencegahan perkawinan anak melalui Forum Anak

Pada tanggal 12 Juli 2025, tim pengabdian Dosen Fakultas Hukum Unnes melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada Forum Anak dengan tema pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Pemalang yang juga bermitra dengan Dinsoskbpp Kabupaten Pemalang. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian ini berfokus pada isu strategis pencegahan perkawinan anak. Pemilihan Forum Anak sebagai peserta didasarkan pada peran strategis mereka sebagai wadah aspirasi, pelopor, sekaligus agen perubahan di kalangan anak dan remaja. Melalui kegiatan ini, diharapkan para anggota Forum Anak mampu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bahaya perkawinan anak, kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta strategi konkret yang bisa mereka lakukan dalam mengampanyekan pencegahan perkawinan anak di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Kegiatan ini menggandeng Pihak Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak DINSOSKBPP selaku mitra kegiatan. Pihak PPA menggarisbawahi bahwa perkawinan anak merupakan salah satu persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius, karena berdampak langsung pada masa depan anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan. Selain itu, perkawinan anak juga berdampak dalam menghambat tercapainya target SDGs, khususnya tujuan nomor 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), tujuan nomor 4 (Pendidikan Berkualitas), serta tujuan nomor 5 (Kesetaraan Gender). Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan terutama anak-anak sendiri menjadi kunci dalam upaya pencegahannya. Dimana berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Pemalang mengalami permasalahan serius terkait perkawinan anak. Dimana angka perkawinan anak terbilang tinggi di tahun 2024.¹⁴ Dari Tim pengabdian mengaitkan isu perkawinan anak dengan agenda global SDGs, sehingga peserta sosialisasi ini yakni Forum Anak memahami bahwa persoalan ini bukan hanya isu lokal, melainkan bagian dari tantangan pembangunan berkelanjutan. Disampaikan pula oleh tim pengabdian, data dan fakta mengenai tingginya angka perkawinan anak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk faktor penyebabnya seperti kemiskinan, norma budaya, kurangnya akses pendidikan, hingga lemahnya pemahaman orang tua mengenai hak anak. Forum Anak diajak untuk berdiskusi dan mengaitkan masalah ini dengan pengalaman yang mereka temui di sekitar mereka, sehingga para anggota Forum Anak dapat secara interaktif dan mempunyai relevansi dengan konteks keseharian lingkungan mereka.

Kemudian selain itu, strategi yang dapat dilakukan oleh Forum Anak sebagai pelopor kampanye pencegahan perkawinan anak. Adalah pentingnya peran Forum anak untuk menjadi suara perubahan di lingkungannya. Strategi yang ditawarkan antara lain berupa kampanye kreatif melalui media sosial, kegiatan edukasi teman sebaya, penyusunan deklarasi atau komitmen bersama, serta kolaborasi dengan sekolah dan organisasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu program yang maksudkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui komunitas dalam hal ini Forum anak yang mempunyai relevansi sebagai fasilitator teman sebaya (*peer educator*). Kegiatan seperti ini dapat dirujuk pada penelitian D. Arisjulyanto et al. Pengaruh Empowerment Community Dalam Upaya

¹⁴ "Gencar 'Jo Kawin Bocah', Pernikahan Dini Di Pemalang Turun - PUSKAPIK.COM," n.d.

Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja,¹⁵ dan juga penelitian Megan S.C, Lim., et al. (2022): Young Adults' Use of Different Social Media Platforms for Health Information. Walaupun konteksnya lebih umum, namun studi ini bisa memberikan suatu pemahaman dan strategi kampanye tentang bagaimana pengaruh remaja dalam menggunakan media sosial untuk informasi Kesehatan.¹⁶

Agar program sosialisasi pencegahan perkawinan anak lebih kongkret dan matang maka kegiatan sosialisasi ini diadakan sesi tanya jawab, tanggapan dan masukan hingga refleksi. Para peserta dari Forum Anak diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, komitmen, maupun tantangan yang mereka hadapi dalam mengampanyekan pencegahan perkawinan anak. Beberapa peserta menyampaikan gagasan dan pertanyaan tentang situasi dan kondisi di sekolah dan lingkungan sosial masing-masing. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan bekal pengetahuan sekaligus inspirasi bagi Forum Anak untuk terus bergerak sebagai pelopor. Kolaborasi antara tim pengabdian, Dinsos, dan Forum Anak menjadi wujud nyata bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan sinergi dari berbagai pihak.



Gambar 1. Diskusi dengan Forum Anak Pemalang

Dari diskusi bersama Forum Anak ada beberapa hal yang menjadi titik tolak permasalahan perkawinan anak di pemalang yakni masalah ekonomi dan masalah-masalah anak yang hamil tidak direncanakan (hamil luar nikah). Maka beberapa menanggapi hal tersebut tim pengabdian dan Forum Anak mendiskusikan kegiatan-kegiatan dan program-program usulan dan inisiatif strategis yang dapat dijalankan melalui komunitas Forum anak dan Dinas Sosial dalam Pencegahan perkawinan anak di masa mendatang antara lain:

1. Sistem Intervensi sekolah

Sekolah dan Forum Anak pada dasarnya dapat menjadi salah satu fondasi program intervensi. Namun, bagaimana inisiatif tersebut dapat dijalankan? Yakni ketika ada anak

¹⁵ Dedy Arisjulyanto et al., "Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia Pengaruh Empowerment Community Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja," *Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia* 01, no. 04 (2023): 19-29.

¹⁶ Megan S.C. Lim et al., "Young Adults' Use of Different Social Media Platforms for Health Information: Insights From Web-Based Conversations," *Journal of Medical Internet Research* 24, no. 1 (January 2022): e23656, <https://doi.org/10.2196/23656>.

yang hampir dinikahkan orang tuanya karena alasan ekonomi atau lain-lain, sekolah bersama Forum Anak dapat langsung bergerak dengan melakukan inisiatif intervensi. Semisal ketika ada siswa yang akan dinikahkan maka pihak sekolah dapat mengambil kebijakan untuk memberi kesempatan bagi pihak yang bersangkutan untuk tetap bersekolah. Hal ini bertujuan supaya anak tetap sekolah dan tidak jadi menikah dini. Dalam kegiatan ini yang terlibat antara lain Guru, pihak sekolah, Forum Anak, orang tua, pemerintah desa. Hal ini memuat suatu komitmen serius dari pihak sekolah untuk mempertahankan siswanya untuk tetap sekolah apapun yang terjadi. Program ini dapat dilaksanakan dengan cara: a) Jika ada anak yang terancam dinikahkan maka Forum Anak bersama sekolah melakukan pendampingan; b) Anak diberi bantuan dan pendampingan baik secara materiil dan secara mental; c) Forum Anak dan guru terus memantau perkembangan kondisi tersebut.

2. Kampanye Sahabat Forum Anak tolak Perkawinan Anak

Program ini hampir sama dengan program "Jaga Kanca" suatu program untuk mencegah kekerasan pada anak seperti *bullying* ataupun kekerasan seksual namun hal ini diarahkan pada pencegahan perkawinan anak. Kampanye ini juga dapat diinisiasi oleh Forum anak dengan menggandeng pihak sekolah maupun orang tua murid dan masyarakat. Kampanye ini dapat dilakukan dengan inisiatif anggota Forum anak yang lintas sekolah untuk menggandeng teman-teman sekolahnya untuk juga mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak. Dengan memberi edukasi dampak negatif dari perkawinan anak.

3. Pendidikan Seksual *ala* Forum anak Teman Sebaya dan pendampingan dari Profesional

Kurikulum Pendidikan seksual dan Kesehatan reproduksi dapat menggabungkan kearifan lokal, dan disampaikan oleh Forum Anak di sekolah sebagai *peer educators*. Hal ini diinisiasi melalui adaptasi kultural dengan *peer delivery* untuk meningkatkan penerimaan. Program ini dapat melalui mitra yakni Dinas Kesehatan ataupun para akademisi yang berkecimpung di bidang kesehatan reproduksi. Tujuannya adalah agar para remaja dan siswa mempunyai pengetahuan yang mumpuni tentang aktivitas seksual dan kesehatan reproduksi sehingga dimaksudkan agar penurunan kehamilan pada remaja. Namun hal ini, harus didasarkan pada komitmen sekolah untuk memasukan pendidikan seksual di muatan lokal sekolah-sekolah tersebut.

KESIMPULAN

Perkawinan anak masih merupakan isu serius yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Pemalang, dengan dampak yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak, terutama anak perempuan. Memanglah tidak mudah untuk menyelesaikan masalah yang berakar pada aspek kultural dan ekonomi. Namun perjuangan untuk mencegah perkawinan anak dapat dilakukan dengan berbagai inisiatif yakni dengan memberdayakan komunitas, salah satunya bersama Forum Anak. Di Kabupaten Pemalang, Forum Anak mempunyai tingkat militansi keaktifan yang tinggi. Oleh karena itu Tim Pengabdian Fakultas Hukum Unnes mengambil inisiatif dan proposal dengan menggandeng Forum anak dengan berbagai program yang dapat untuk menuntaskan pencegahan perkawinan anak di Pemalang. Seperti sistem intervensi sekolah, yang mana menuntut komitmen sekolah melalui tekanan dari forum anak agar

mempertahankan anak yang akan dinikahkan untuk tetap sekolah apapun konsekuensinya. Yang kedua, Program sahabat Forum Anak tolak Nikah Dini yang mana dijalankan dengan inisiatif dari peran Forum anak mengkampanyekan ke teman sebaya tentang dampak negatif perkawinan anak. Kemudian yang terakhir adalah Pendidikan Seksual oleh teman sebaya dan Kesehatan Reproduksi dimana dilakukan dengan bantuan dari Dinas Kesehatan maupun para akademisi dibidang tersebut.

REFERENSI

- "5 Provinsi Dengan Tingkat Pernikahan Tertinggi 2024 - GoodStats Data," n.d.
- Arafah, Nawal Nur, and Purwanto Purwanto. "'Jo Kawin Bocah' Social Movement to Reduce Child Marriage Rates in Central Java." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 7, no. 2 (2023): 127-42. <https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.2.17604>.
- Arisjulyanto, Dedy, Korinus Suweni, Prodi D-Iii Keperawatan, Kepulauan Yapen, and Kemenkes Jayapura. "Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia Pengaruh Empowerment Community Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja." *Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia* 01, no. 04 (2023): 19-29.
- "Gencar 'Jo Kawin Bocah', Pernikahan Dini Di Pemalang Turun - Puskapik.Com," n.d.
- Grijns, Mies, Sherlywati Lijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restunigrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti, and Ricky Ardian Harahap. "Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan." *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesenjangan* 21, no. 1 (2016): 49-58.
- ICRW, and UNFPA. "Child Marriage in Southern Asia," 2016, 1-23.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. "Contradictions Between Marriage Dispensation and Efforts to Minimize Marriage In Indonesia." *Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (20AD): 203-22.
- Kartikawati, Reni. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda*, 2015.
- Latifiani, Dian. "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): 241-58. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>.
- Lim, Megan S.C., Annika Molenaar, Linda Brennan, Mike Reid, and Tracy McCaffrey. "Young Adults' Use of Different Social Media Platforms for Health Information: Insights From Web-Based Conversations." *Journal of Medical Internet Research* 24, no. 1 (January 2022): e23656. <https://doi.org/10.2196/23656>.
- Mahendra, Mahendra, Violis Maisuri, and Muflaha Wijayati. "Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective." *MILRev : Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 282. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6215>.
- Nur Falah, Muhammad, Auji Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah. "Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (October 2020): 167-82. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>.

Putri, Nike Dwi. "Faktor Sosial Ekonomi Dalam Perkawinan Anak Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 11, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.47789>.

"Sepasang Murid SMP Menikah Dini Di Pematang, Pihak Sekolah Kaget," n.d.

Warastuti, Diah, Yulia Herawati, and Evi Kurniasih. "Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Indramayu." *Kesehatan Dan Kebidanan* 10, no. 2 (2021).